

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk mendorong peningkatan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menjamin bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui peningkatan output atau pendapatan regional semata, melainkan juga melalui kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan pendapatan yang lebih seimbang. Ketimpangan pendapatan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pembangunan ekonomi karena mencerminkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu diterjemahkan ke dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas. Ketimpangan yang tinggi menunjukkan adanya konsentrasi pendapatan pada kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat lainnya belum memperoleh manfaat pembangunan secara optimal, yang pada akhirnya dapat memicu berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang bersifat jangka panjang.

Ketidakadilan dalam pendapatan merupakan keadaan yang tidak hanya terlihat pada skala nasional, tetapi juga nyata di tingkat regional dan lokal sebagai akibat dari perbedaan karakteristik sosial ekonomi antar daerah. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu kawasan tidak selalu memberikan keuntungan yang merata bagi semua lapisan masyarakat, sehingga pembagian pendapatan yang ada cenderung tidak seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan kesejahteraan di kalangan

masyarakat. Untuk menggambarkan sejauh mana ketidakmerataan pendapatan ini, penelitian ini memanfaatkan Rasio Gini sebagai alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Indikator ketimpangan yang umum digunakan adalah Rasio Gini, yang menggambarkan tingkat ketidakmerataan pendapatan dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan data Rasio Gini Kota Kediri dibandingkan dengan 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, posisi tingkat ketimpangan pendapatan Kota Kediri selama lima tahun terakhir menunjukkan kondisi yang fluktuatif.



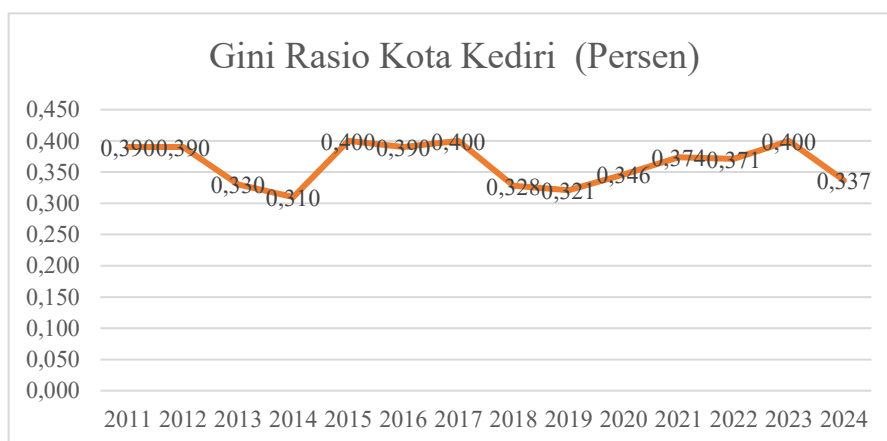
Sumber: BPS Kota Kediri, diolah (2020-2024)

Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Kediri mengalami perubahan dari tahun ke tahun dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Mengingat data penelitian mencakup periode 2011–2024 yang cenderung berfluktuatif, maka penelitian ini hanya menampilkan lima tahun terakhir (2020–2024).

Nilai Rasio ini berada pada rentang antara nol hingga satu. Apabila nilainya mendekati nol, hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan antarpenduduk

semakin merata. Sebaliknya, apabila nilainya mendekati satu, kondisi tersebut mencerminkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi, di mana sebagian besar pendapatan terkonsentrasi pada kelompok tertentu dalam perekonomian. Dengan menggunakan Rasio Gini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang jelas tentang tingkat ketimpangan pendapatan yang berlangsung, sehingga dapat menjadi dasar untuk menganalisis dampak faktor-faktor sosial ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di tingkat lokal. Perbedaan tingkat ketimpangan pendapatan antarwilayah berkaitan dengan variasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk tingkat kemiskinan, struktur upah minimum, dan perkembangan aktivitas ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB. Berikut adalah grafik Gini Rasio Kota Kediri selama periode 2011–2024.

**Gambar 1.1 Grafik Persentase Gini Rasio Kota Kediri Tahun 2011–2024**



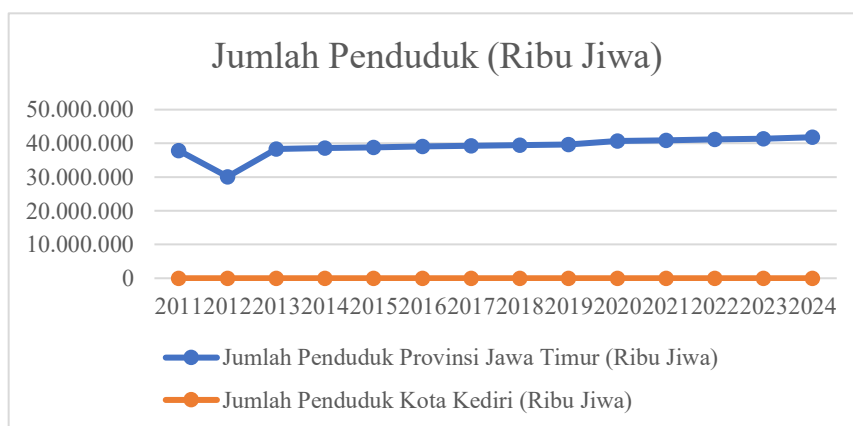
Sumber: BPS Kota Kediri, diolah (2011-2024)

Berdasarkan Gambar 1.1, ketimpangan pendapatan di Kota Kediri menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi selama periode penelitian. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pemerataan pendapatan di Kota Kediri belum berlangsung secara konsisten seiring dengan perkembangan perekonomian daerah.

Perubahan ketimpangan yang terjadi menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi belum secara langsung menciptakan pemerataan pendapatan di antara seluruh kelompok masyarakat.

Kondisi tersebut juga berkaitan dengan karakteristik perekonomian Kota Kediri yang didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Perkembangan sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan menciptakan kesempatan kerja, tetapi manfaat yang dihasilkan belum tentu terdistribusi secara merata kepada seluruh masyarakat. Perbedaan kemampuan dalam memperoleh pekerjaan, pendapatan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan tetap terjadi. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi Kota Kediri perlu disertai dengan upaya pemerataan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat..

**Gambar 1.2 Grafik Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur dan Kota Kediri Tahun 2011–2024**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah (2011-2024)

Grafik 1.2 memperlihatkan perkembangan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur dan Kota Kediri selama periode 2011–2024. Secara umum, jumlah penduduk

Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Jawa Timur tercatat sebesar 40.665.696 jiwa dan terus meningkat hingga mencapai 41.814.500 jiwa pada tahun 2024. Jika ditarik sejak awal periode, pada tahun 2011 jumlah penduduk Jawa Timur sebesar 37.840.657 jiwa, kemudian berada pada kisaran 38 juta jiwa pada tahun 2013–2015, meningkat menjadi lebih dari 39 juta jiwa pada tahun 2016–2019, dan melampaui 40 juta jiwa sejak tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk tersebut mencerminkan dinamika demografi yang relatif stabil, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alami penduduk serta pergerakan migrasi antarwilayah dalam skala provinsi. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Timur memiliki karakteristik kependudukan yang beragam, baik dari sisi persebaran penduduk, tingkat urbanisasi, maupun struktur ekonomi wilayahnya.

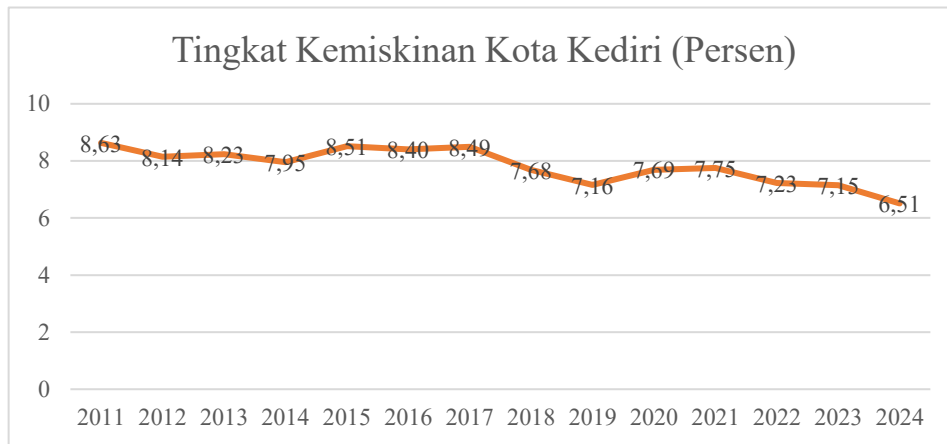
Pada periode yang sama, jumlah penduduk Kota Kediri juga menunjukkan peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Kediri tercatat sebesar 2.868.000 jiwa dan meningkat hingga mencapai 2.982.000 jiwa pada tahun 2024. Sejak tahun 2011 yang berjumlah 2.715.110 jiwa, penduduk Kota Kediri terus bertambah hampir setiap tahun, dengan kenaikan yang relatif konsisten meskipun pada tahun 2020 sempat mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2019. Meskipun secara absolut jumlah penduduk Kota Kediri jauh lebih kecil dibandingkan Provinsi Jawa Timur, peningkatan jumlah penduduk tersebut menunjukkan adanya daya tarik ekonomi dan sosial di wilayah perkotaan. Kota Kediri memiliki luas wilayah sekitar 63,40 kilometer persegi, sedangkan luas Provinsi Jawa Timur mencapai sekitar 47.803 kilometer persegi, sehingga Kota Kediri hanya menempati sebagian kecil dari keseluruhan wilayah provinsi. Kondisi

ini menyebabkan kepadatan penduduk di Kota Kediri tergolong tinggi, yang berimplikasi pada kebutuhan infrastruktur, layanan publik, serta pengelolaan tata ruang perkotaan.

Dari sisi struktur ekonomi, Kota Kediri dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di wilayah Jawa Timur bagian barat. Perekonomian Kota Kediri didominasi oleh sektor industri pengolahan, khususnya industri rokok yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh PT Gudang Garam Tbk. Dalam berbagai kajian ekonomi regional, kontribusi industri tersebut terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri tercatat sangat besar dibandingkan sektor lainnya. Selain industri pengolahan, sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan pergudangan juga berperan dalam menopang aktivitas ekonomi daerah. Peran Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, pendidikan, dan jasa regional mendorong arus masuk penduduk, baik untuk bekerja, membuka usaha, maupun menempuh pendidikan.

Perbandingan antara jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur dan Kota Kediri menunjukkan perbedaan karakteristik wilayah yang cukup kontras. Jawa Timur memiliki wilayah yang luas dengan struktur ekonomi yang beragam serta persebaran penduduk yang tidak merata antar kabupaten/kota. Sebaliknya, Kota Kediri merupakan wilayah perkotaan dengan keterbatasan ruang dan aktivitas ekonomi yang lebih terkonsentrasi. Perbedaan karakteristik ini memengaruhi pola pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan, serta kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah selama periode 2011–2024.

**Gambar 1.3 Grafik Persentase Tingkat Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2011–2024**



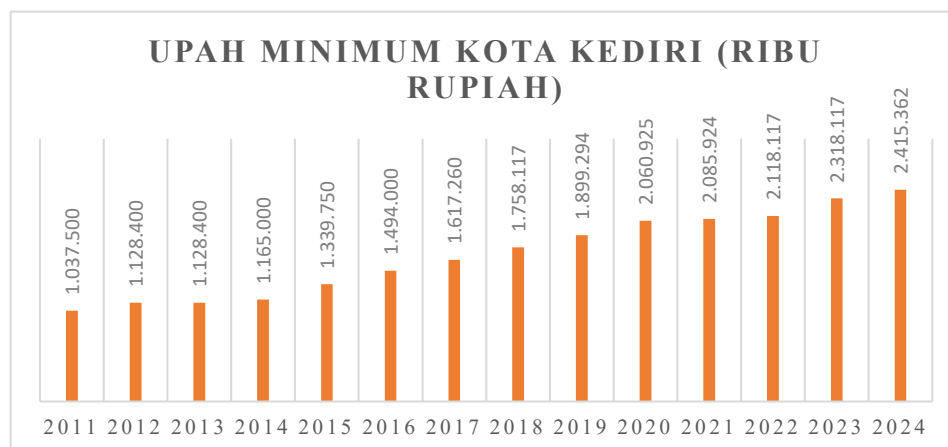
Sumber: BPS Kota Kediri, diolah (2011-2024)

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kondisi ini tercermin dari keterbatasan sebagian penduduk dalam mengakses sumber daya ekonomi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan kerja yang memadai. Permasalahan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut kualitas hidup secara menyeluruh. Ketika tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, maka dampaknya dapat dirasakan pada meningkatnya kerentanan sosial serta ketimpangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, tingkat kemiskinan kerap dijadikan sebagai indikator penting untuk melihat sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan mampu meningkatkan kesejahteraan secara lebih merata.

Berdasarkan Gambar 1.3, tingkat kemiskinan di Kota Kediri menunjukkan pola yang cenderung menurun meskipun masih mengalami beberapa kali peningkatan selama periode penelitian. Penurunan tersebut menunjukkan adanya

perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat, namun peningkatan yang terjadi pada beberapa tahun menunjukkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masih cukup rentan terhadap perubahan perekonomian. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh pendapatan yang layak. Karakteristik Kota Kediri sebagai wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa memberikan peluang terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Namun, kesempatan tersebut belum tentu dapat diakses secara merata oleh seluruh masyarakat, terutama kelompok masyarakat dengan keterbatasan keterampilan dan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, meskipun tingkat kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun, kondisi tersebut tetap perlu diperhatikan karena berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan di Kota Kediri.

**Gambar 1.4 Upah Minimum Kota Kediri Tahun 2011–2024**



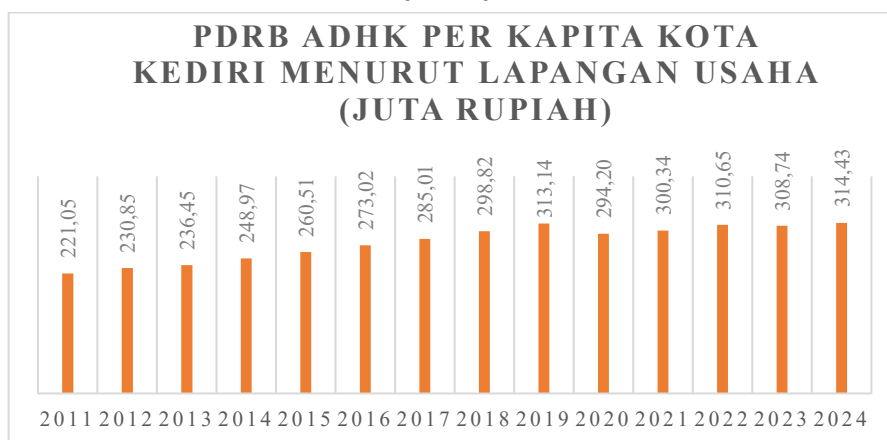
Sumber: BPS Kota Kediri, diolah (2011-2024)

Pada Gambar 1.4, perkembangan UMK Kota Kediri menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama periode penelitian. Kenaikan tersebut menunjukkan

adanya penyesuaian tingkat upah minimum yang berlangsung seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian dan kebutuhan hidup pekerja. Meskipun terdapat periode dengan kenaikan yang relatif terbatas, secara umum perkembangan UMK menunjukkan adanya peningkatan standar upah minimum bagi tenaga kerja di Kota Kediri.

Kondisi tersebut berkaitan dengan karakteristik Kota Kediri yang memiliki aktivitas ekonomi pada sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar. Peningkatan UMK dapat meningkatkan pendapatan pekerja, khususnya kelompok pekerja dengan tingkat upah rendah, sehingga berpotensi memperkecil kesenjangan pendapatan. Namun, manfaat kenaikan UMK tidak selalu dirasakan secara sama oleh seluruh masyarakat karena terdapat perbedaan antara tenaga kerja sektor formal dan informal. Oleh karena itu, perkembangan UMK menjadi salah satu kondisi sosial ekonomi yang relevan untuk dikaji dalam kaitannya dengan ketimpangan pendapatan di Kota Kediri.

**Gambar 1.5 PDRB Per Kapita Kota Kediri Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011–2024**



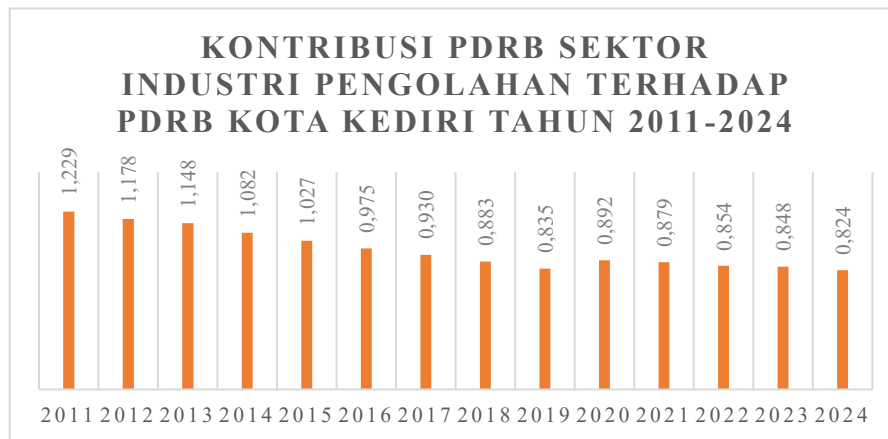
Sumber: BPS Kota Kediri, diolah (2011-2024)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk dan kemajuan ekonomi suatu wilayah. PDRB per Kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut.

Pada Gambar 1.5, perkembangan PDRB ADHK per kapita Kota Kediri menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian Kota Kediri secara umum mengalami perkembangan dan mampu kembali pulih setelah mengalami tekanan pada tahun 2020. Namun, peningkatan PDRB per kapita sebagai gambaran rata-rata aktivitas ekonomi belum dapat menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan telah dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Karakteristik perekonomian Kota Kediri yang cukup bergantung pada sektor industri pengolahan, khususnya industri rokok, menyebabkan perkembangan PDRB sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor tersebut. Di sisi lain, sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan pergudangan turut mendukung aktivitas ekonomi daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PDRB per kapita belum tentu diikuti dengan pemerataan pendapatan karena manfaat perkembangan ekonomi dapat diterima secara berbeda oleh setiap kelompok masyarakat. Oleh karena itu, PDRB per kapita menjadi salah satu faktor yang relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan ketimpangan pendapatan di Kota Kediri.

**Gambar 1.6 Perkembangan Kontribusi PDRB Sektor industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Kediri Tahun 2011-2024**



Sumber: BPS Kota Kediri, diolah (2011-2024)

Dalam struktur perekonomian Kota Kediri, sektor industri pengolahan memiliki kedudukan yang strategis dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai besarnya peran industri rokok dalam perekonomian daerah, sektor ini menempati posisi yang sangat penting dalam struktur PDRB Kota Kediri. Dominasi tersebut tercermin dari kontribusinya yang signifikan terhadap pembentukan nilai tambah daerah, sehingga pergerakan sektor ini berpengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kontribusi yang relatif besar tersebut tidak hanya berkaitan dengan penciptaan output, tetapi juga dengan penyediaan lapangan kerja serta perputaran aktivitas ekonomi di berbagai sektor pendukung.

Gambar 1.6 memperlihatkan perkembangan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Kediri selama periode 2011–2024. Pada tahun 2011 kontribusinya tercatat sebesar 1,229 dan mengalami penurunan secara bertahap menjadi 1,178 pada tahun 2012 serta 1,148 pada tahun 2013. Penurunan

berlanjut pada tahun 2014 menjadi 1,082 dan tahun 2015 sebesar 1,027. Pada tahun 2016 kontribusi turun menjadi 0,975, kemudian kembali menurun pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 0,930 dan 0,883. Tahun 2019 tercatat sebesar 0,835. Pada tahun 2020 kontribusi meningkat menjadi 0,892, namun kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 0,879, tahun 2022 sebesar 0,854, tahun 2023 sebesar 0,848, dan pada tahun 2024 mencapai 0,824. Secara umum, perkembangan data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Kediri mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Penurunan yang berlangsung secara bertahap sejak 2011 hingga 2019, peningkatan pada tahun 2020, serta penurunan kembali pada periode berikutnya mencerminkan dinamika peran industri pengolahan dalam struktur perekonomian daerah yang berjalan seiring dengan perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya.

Fenomena pada data Kota Kediri periode 2011–2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. PDRB per kapita cenderung meningkat walaupun sempat menurun pada 2020, dan UMK terus mengalami kenaikan setiap tahun. Tingkat kemiskinan juga tidak stabil karena sempat meningkat pada beberapa periode sebelum kembali turun menjadi 6,51 pada 2024. Pada periode yang sama, ketimpangan pendapatan justru meningkat cukup tinggi pada beberapa tahun, terutama dari 0,310 pada 2014 menjadi 0,400 pada 2015, kembali berada di angka 0,400 pada 2017 dan 2023 sebelum turun pada 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi dan kenaikan upah belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan pendapatan yang berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya menggunakan wilayah kajian yang lebih luas, seperti tingkat provinsi atau nasional, serta menggunakan periode waktu yang berbeda-beda. Penelitian mengenai ketimpangan pendapatan di Kota Kediri juga masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan secara lebih spesifik di Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan data waktu periode 2011–2024 dan bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan, Upah Minimum Kota (UMK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita terhadap ketimpangan pendapatan, guna memperoleh gambaran empiris mengenai dinamika pendapatan di tingkat daerah.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Kediri?
- b. Apakah Upah Minimum Kota (UMK) berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Kediri?
- c. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Kediri?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Kediri.
- b. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum Kota (UMK) terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Kediri.
- c. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Kediri.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Untuk menjaga agar pembahasan dalam penelitian ini tetap terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan batasan ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Penelitian ini membahas ketimpangan pendapatan sebagai variabel dependen, dengan variabel independen yang terdiri atas tingkat kemiskinan, Upah Minimum Kota (UMK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita.
- b. Objek penelitian ditetapkan di Kota Kediri sebagai wilayah kajian utama dengan mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi dan struktur perekonomian daerah.

- c. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari lembaga resmi, khususnya Badan Pusat Statistik (BPS), dengan periode pengamatan tahun 2011 hingga 2024.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara variabel-variabel penelitian, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di tingkat daerah.
- b. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan dalam kajian ekonomi pembangunan, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik serupa.